DOI: 10.36835/ancoms.v7i1.484

KONTRIBUSI WARISAN NILAI-NILAI KERAJAAN ISLAM TERHADAP PEMBENTUKAN PANCASILA DI NUSANTARA

Yunita Wulandari
Universitas Al-Falah As- Sunniyyah Jember
yunitawulan@inaifas.ac.id
Khurun'in Zahro'
Universitas Darussalam Gontor Ponorogo
khuruninzahro@unida.gontor.ac.id
Akmal Hidayah
Universitas Darussalam Gontor Ponorogo
akmalhidayah93@student.pm.unida.gontor.ac.id

Abstract: *Pancasila is the Republic of Indonesia's fundamental philosophy. Before entering the colonial period, it formed and molded from many characteristics and influences of the Islamic Kingdom. The rise of the Islamic Kingdom had an impact on the values of Indonesian society. This research focuses on the legacy of Islamic Kingdom values in the establishment of Pancasila in Indonesia. The purpose of this study is to examine the creation of Pancasila through the lens of the Islamic Kingdom's heritage values in the archipelago/Indonesia. This is a qualitative method with a historical study, the data taken from some literature and historical book. As a result, the principles of social life throughout the Islamic Kingdom influenced each precept. There were numerous forms of Pancasila value creation, resulting in a synthesis of the values inherited by the Islamic Kingdom in the formation of the state ideology, namely is Pancasila.*

Keywords: *Pancasila, Islamic, Islamic Kingdom, Values*

PENDAHULUAN

Sebagai sebuah negara yang berdaulat Negara Indonesia memiliki filosofi dasar dari Negara dan Bernegara yang disebut Soekarno sebagai *philosophische grondslag (filosofi dasar)*. Filosofi dasar Negara Indonesia ini tidak lain adalah *"weltanschauung" (pandangan hidup)* atau *"worldview"* berupa Pancasila.[1] *Worldview* inilah kemudian yang akan menentukan arah berfikir, berperilaku bahkan tujuan dari Negara Indonesia ini. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya setiap golongan atau agama memiliki *worldviewnya* masing-

[1] Hamid Fahmy Zarkasyi *ed., Rasional Tanpa Menjadi Liberal, Menjawab Tantangan Liberalisasi Pemikiran Islam. Vol 1*. Jakarta: Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations (INSISTS). 2021, *hal. 350*

masing, namun dengan adanya Pancasila sebagai *worldview* Bangsa Indonesia, maka *Worldview* Pancasila ini menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji.

Pancasila sendiri tidak bisa terbentuk melalui proses yang singkat, jika dikaji secara historis terdapat banyak hal yang mempengaruhi perumusan Pancasila, salah satunya adalah meminjam penjelasan tentang nilai-nilai agama yang sudah ada di Indonesia sebelum negara ini merdeka, khususnya kepada Agama Islam sebagai agama mayoritas bagi seluruh penduduk Indonesia yang sudah lama berkembang di Nusantara.[2] Bahkan, Hamid Fahmy Zarkasyi berpendapat jauh dalam lagi pada salah satu karyanya yang berjudul "*Worldview Pancasila"* bahwasanya jika Pancasila tidak akan pernah terbentuk jika tidak meminjam nilai yang ada pada agama.[3] Begitu pula dengan apa yang dipaparkan oleh Mohammad Natsir, bahwasanya Pancasila akan hidup subur dalam Islam karena dalam sila pertama sendiri yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa" akan menentukan sila-sila selanjutnya, meskipun tidak berarti bahwasanya Pancasila itu Islam meskipun di dalamnya terdapat tujuan-tujuan Islam.[4]

Sumbangsih nilai-nilai yang ditinggalkan oleh kerajaan Islam di Indonesia tidak bisa dianggap sepele terhadap pengaruhnya terhadap Pancasila sebagai dasar konstitusional Negara Indonesia. Munculnya kekuasaan kerajaan-kerajaan Islam selama kurang lebih sepuluh abad di Nusantara meninggalkan pengaruh yang mendalam bagi masyarakat Indonesia, dari mulai berdirinya kerajaan Perlak di Sumatera pada tahun 840,[5] hingga runtuhnya kerajaan Siak karena diambil alih oleh pemerintah Hindia-Belanda pada tahun 1873. [6] Semua kerajaan Islam di Indonesia membimbing rakyatnya untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang dikandung oleh Pancasila, seperti musyawarah, gotong royong, keadilan sosial, hingga mewujudkan persatuan diatas ragam suku dan budaya untuk melawan penjajahan dan kolonialisme. Semangat patriotik yang dimiliki oleh Kerajaan-kerajaan di Nusantara mewariskan jiwa kemerdekaan kepada pemuda-pemuda Indonesia yang akhirnya membawa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka.

Cikal bakal nilai-nilai tersebut kemudian digunakan oleh para anggota BPUPKI dalam prosesi perumusan Pancasila pada sidang pertamanya. Oleh karena itu Prof. Dr. Kaelan M.S. menyebutkan bahwasannya sejarah kerajaan Islam sebagai salah satu *kausa materialis Pancasila*, salah satu aspek sejarah yang membentuk Pancasila sekaligus *local wisdom* yang mempengaruhinya. [7] Kemudian nilai-nilai ini juga diadopsikan kepada perancangan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai posisi tertinggi dalam perundang-undangan Negara Indonesia.

---

[2] Achmad Syafii Maarif, *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia. 2006, *hal. 1*

[3] Hamid Fahmy Zarkasyi berpendapat, "Namun perlu diingat bahwa sebagai sebuah *worldview,* Pancasila perlu meminjam penjelasan kepada agama-agama. Pada sila pertama yang berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa misalnya, maksudnya adalah tuhan dalam konsepsi agama-agama. Bukan sembarang tuhan, bukan tuhan para penganut *deis,* atau *theis*, tuhan orang-orang komunis atau tuhan pada aliran-aliran spiritual apapun. Jika tidak meminjam kepada agama-agama, Pancasila sendiri akan menjadi agama. Hal ini bertentangan dengan konsep awalnya". Lihat, Hamid Fahmy Zarkasyi *, Rasional Tanpa menjadi Liberal,hal. 351*

[4] Mhd. Alfahjri Sukri, "Islam dan Pancasila dalam Pemikiran Mohammad Natsir", *Alfuad: Jurnal Ilmiah Sosial Keagamaan, Vol.3 No.1,* 2019. *hal 91*

[5] Binuko Amarseto, *Ensklopedia Kerajaan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Istana Media, 2015. *hal. 31*

[6] *Ibid. hal. 341*

[7] Kaelan, *Pendidikan Pacasila.* Yogyakarta: Paradigma. 2016. *Hal.18-19*

Penelitian ini berusaha untuk menuturkan analisis deskriptif dan kritis dari berbagai literatur secara kualitatif untuk menjawab pertanyaan: "Apa kontribusi warisan nilai-nilai Kerajaan Islam di Nusantara dalam pembentukan Pancasila?". Maka untuk memudahkan pembahasan didalamnya, peneliti membagi pembahasan menjadi tiga bagian, *pertama,* pembahasan mengenai perkembangan Kerajaan Islam di Indonesia. *Kedua,* dilanjutkan pembahasan mengenai wujud nilai-nilai dalam kerajaan Islam dan korelasinya dengan Pancasila. *Ketiga,* proses adopsi/ implementasi nilai-nilai kerajaan Islam pada rancangan Pancasila.

PERKEMBANGAN KERAJAAN ISLAM DI INDONESIA

Setelah hegemoni kerajaan Hindhu-Budha perlahan hilang dari Nusantara, kerajaan-kerajaan Islam mulai tumbuh dan berkembang menggantikan posisinya. Puncaknya ketika abad ke-13 kondisi kerajaan Sriwijaya mencapai akhir kekuasaanya, kerajaan-kerajaan Islam mulai tumbuh menjadi warna kekuasaan baru di Nusantara.[8] Meskipun sebenarnya kerajaan Islam sudah pertama kali berdiri di Indonesia sudah 5 abad lebih dahulu sebelum keruntuhan sriwijaya, yaitu ketika berdirinya Kerajaan Perlak pada tahun 840 di ujung pulau Sumatera.[9] Kerajaan Islam di Nusantara kemudian terus berkembang bahkan ketika kolonialisme berada di Indonesia. Perlawanan kerajaan-kerajaan di Nusantara bahkan menjadi hal yang sangat diwaspadai oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanada kala itu.

Masuknya Islam sendiri ke Indonesia memiliki beberapa pendapat di kalangan sejarawan Modern, beberapa pendapat mengatakan bahwasannya Islam masuk ke Indonesia dari tanah Gujarat (India). Namun Ahmad Mansur Suryanegara dalam karyanya *Api Sejarah: Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia* menjelaskan bahwasannya Islam di Indonesia masuk langsung dari Makkah dan Madinah sebagai pusat peradaban Islam kala itu. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kota "Serambi Madinah" dan "Serambi Makkah" di Indonesia yang menandakan dekatnya nilai historis dan sosial budaya didalamnya, bukan dengan adanya kota "Serambi Gujarat" di Indonesia.[10] Hal ini juga senada dengan pendapat yang disampaikan oleh KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam penelitiannya, bahwa agama

[8] Binuko Amarseto, *Ensklopedia Kerajaan Islam di Indonesia, hal. 15*.
[9] *Ibid. hal. 35*.
[10] Ahmad Mansur Suryanegara memaparkan, "Berdasarkan fakta sejarah, pada abad ke-9 M telah dibangun kekuasaan politik Islam di Aceh. Apabila diperhatikan, nama Aceh disebut sebagai Serambi Makkah. Apakah hal ini sebagai salah satu bukti bahwa masuknya Islam bukan dari Gujarat, melaikan dari Makkah? Apakah penamaan Serambi Makkah merupakan bukti kebenaran teori Makkah yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Buya Hamka? Sebaliknya, tidak ada sebuah kota pun atau wilauyah di Nusantara Indonesia yang disebut sebagai Serambi Gujarat. Apakah hal itu sebagai bukti kelemahan Teori Gujarat tersebut mengenai masuknya Islam ke Nusantara Indonesia yang dikemukakan Prof. Dr. Snouck Hurgrounje? Kalau memang ada kota lain, misalnya Gorontalo disebutnya sebagai Serambi Madinah. Demikian pula Madura pernah disebut sebagai Serambi Madinah juga. Kedua nama kota Makkah dan Madinah, memberi pengertian bahwa Islam masuk ke Nusantara Indonesia berasal dari kota asal Rasulullah SAW berdakwah dalam menegakkan ajaran Islam. Bukan dari Gujarat." Lihat. Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah: Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jilid Kesatu*. Bandung: Surya Dinasti, 2018, *hal.155*

Islam di Indonesia masuk langsung dari Jazirah Arab.[11] Kedua pendapat ini mengkritisi teori Gujarat yang dibawakan oleh Prof. Dr. Snouck Hurgrounje.

Secara umum berdirinya kerajaan Islam di Indonesia dapat digolongkan kedalam tiga zona utama.[12] *Zona Pertama,* yaitu kerajaan yang berdiri di daerah Sumatera meliputi Kerajaan Perlak, Kerajaan Samudera Pasai, Kerajaan Aceh, dan Kerajaan Siak. *Zona Kedua,* berbagai kerajaan yang tumbuh di pulau Jawa yaitu, Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Cirebon dan Kerajaan Banten. *Dan Zona Ketiga,* yaitu kerajaan yang berkembang di Pulau Kalimantan, Sulawesi dan daerah Timur Indonesia, meliputi kerajaan Ternate dan Tidore, kerajaan Makassar, Kerajaaan Bone, Kerajaan Banjar, Kerajaan Pontianak dan Kerajaan Kutai Kartanegara. Ahmad Mansur Suryanegara menyebutkan jika ditelusuri lebih dalam, terdapat 73 kesultanan dan kerajaan yang berdiri di Nusantara.[13]

Berbagai kerajaan Islam di Indonesia terus meraih kegemilangan dalam berbagai aspek peradaban, baik secara ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, bahkan pemerintahan, hingga mulai mengalami kemunduran ketika masuknya kolonialisme ke Indonesia. Dasar-dasar kebangsaan mulai tumbuh dalam masyarakat Indonesia, hal itu terlihat dari nilai-nilai adat-istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius yang mengiringinya.[14] Nasionalisme pun mulai tampak ketika pengaruh kerajaan Islam mulai memudar dan munculnya semangat kemerdekaan pada abad ke-18. Meskipun pengaruh multikultural sangatlah berpengaruh dalam perjuangan bangsa Indonesia, namun masyarakat Indonesia kala itu mampu mewujudkan daya tampung luar biasa untuk mengintegrasikan berbagai macam suku, tradisi dan budaya.[15]

Maka tidak dapat dipungkiri bahwa Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia merupakan Garda Terdepan yang menolak secara langsung adanya kolonialisme dan penjajahan di Indonesia. Hal ini berimplikasi pada timbulnya jiwa kemerdekaan dan nasionalisme pada masyarakat Indonesia kala itu. Maka dapat dirumuskan adanya beberapa faktor utama yang mendukung lahirnya Gerakan kebangsaan dan nasionalisme saat itu.[16] *Yang pertama,* terbentuknya kesatuan agama bangsa Indonesia. Kesamaan keyakinan Islam membawa solidaritas perlawanan terhadap misi misionaris dan serangan politik Kristenisasi yang dibawakan oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda. *Yang Kedua,* Islam tidak hanya

---

[11] Abdurrahman Wahid mengatakan, "Islam datang ke Indonesia dengan cara damai, melalui gerakan perdagangan dan mistik. Meskipun ia datang sangat awal dari Jazirah Arab, beberapa mengatakan selama abad pertama Islam atau pertengahan abad ke-8 M, Islam tidak benar-benar menampakkan dirinya di wilayah ini hingga abad ke-13 M, ketika komunitas Islam pertama berdiri di ujung utama Sumatera. Selanjutnya ia menyebar ke pantai barat Malaka, pantai timur Kalimantan, Sulawesi Tenggara, pulau utara Melayu, dan pantai utara Jawa. Tidak sampai abad ke-15 M, sebuah kerajaan Islam besar mulai Nampak di wilayah tersebut. Ketika pada "penjelajah" Eropa awal mencapai wilayah itu, dan diikuti secara langsung oleh kapal perdagangan, mereka telah bertemu dengan pemerintahan muslim pribumi. Hal ini terjadi secara efektif, sebagaimana disaksikan oleh sejarah." Lihat: Syaiful Arif, *Islam, Pancasila, dan Deradikalisasi, Meneguhkan Nilai Keindonesiaan.* Jakarta: Elex Media Komputindo. 2018. *hal. 49-50.*

[12] Aisyah Nursyarief, "Pendidikan Islam di Indonesia dalam Lintasan Sejarah (Perspektif Kerajaan Islam)" dalam *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Vol. 17 No. 2*. 2014. *hal. 258*

[13] Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah: Mahakarya……, hal. 577*

[14] Kaelan, *Pendidikan Pacasila, hal. 19*

[15] Sahirul Alim, "Islam, Multikulturalisme, dan Pancasila" dalam *Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan, Vol. 23, No. 2,* 2019. *hal.* 90

[16] Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah: Mahakarya,…... hal. 343*

sebagai agama yang mengajarkan perlunya membangun jamaah, namun Islam juga sebagai simbol perlawanan pada penjajah asing barat. Dorongan ini yang kemudian mendorong raja-raja Hindhu dan Budha untuk ikut masuk Islam, karena invasi Imperialis Katolik Portugis dan Protestan Belanda merusak kehidupan masyarakat Hindhu dan Budha. *Yang Terakhir,* Bahasa melayu pasar, yang digunakan oleh mayoritas masyarakat Indonesia menjadi Bahasa Persatuan Indonesia yang secara tidak langsung mendorong semangat persatuan.

WUJUD NILAI-NILAI DALAM KERAJAAN ISLAM DAN KORELASINYA DENGAN PANCASILA

Sebagai sebuah peradaban yang berlangsung selama kurang lebih sepuluh abad, Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia telah meninggalkan berbagai macam nilai-nilai yang dibawa oleh ajaran Islam itu sendiri, atau dari akulturasi kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia dengan peradaban Islam. Nilai-nilai ini kemudian menjadi ciri khas yang membangun dasar kenegaraan Bangsa Indonesia jauh sebelum proklamasi kemerdekaan, yang kemudian membangun jiwa kenegaraan dan Nasionalitas. Karena untuk mengkaji nilai-nilai yang ada pada Negara Indonesia kita harus menggali kedalaman filosofis murni dari kehidupan Masyarakat Indonesia, bukan dari ajaran luar.[17] Karena pada hakikatnya dasar Negara Indonesia dibangun atas faktor internal yang kemudian di asimilasi dan didukung dengan adanya pengaruh eksternal.

Pembahasan mengenai adanya nilai-nilai Pancasila pada Kerajaan Islam dapat kita jabarkan menjadi pembahasan pada tiap-tiap butir sila yang ada dalam Pancasila, karena kita tidak bisa memungkiri kelima sila yang ada dalam Pancasila merupakan sesuatu yang koheren. Setiap sila memiliki korelasi dan hubungan dalam butir-butir sila lainnya, hal ini membuktikan bahwasannya Pancasila merupakan sesuatu yang integral.

Sila Pertama, pada sila yang pertama ini tidak dapat dipungkiri bahwa bentuk ajaran Islam yang mendasari terbentuknya berbagai kerajaan Islam di Indonesia.[18] Ajaran tauhid pada kerajaan Islam menangkal berbagai macam keyakinan yang menyimpang, dan berbagai macam aliran kebatinan yang menguasai masyarakat Indonesia kala itu. Karena sebelumnya Indonesia dikenal sebagai negara yang mempercayai unsur-unsur mistisme dan kesyirikan, yang kemudian dicerahkan dengan adanya cahaya ajaran Islam. Meskipun butir Pancasila ini sejatinya merupakan ungkapan bahwasanya bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama, anti ateisme, sekularisme dan pruralisme. Hal ini telah ditunjukan oleh kerajaan Islam dari mulai pertama berdirinya, dimanapun letaknya terhadap konsistensinya untuk mengajari masyarakat Indonesia ajaran Islam dan berhenti mengikuti *khurafat* yang ada.

Lebih jauh lagi dasar Pancasila yang dibawa kerajaan islam ini, mengilhami adanya keempat sila yang lainnya, sehingga membentuk masyarakat Muslim yang memiliki sifat Pancasilais yang utuh.[19] Dalam konsep toleransi beragama Kerajaan-kerajaan Islam telah

[17] M. Saifullah Rohman, "Kandungan Nilai-Nilai Syariat Islam dalam Pancasila" dalam *Millah: Jurnal Studi Agama, Vol. 13, No.1.* 2013. *hal. 206*
[18] *Ibid. hal. 209.*
[19] Hamid Fahmy Zarkasyi menyatakan, "Bagi Muslim, sila kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa berarti tauhid. Seorang Muslim yang beriman kepada Tuhan Allah Swt. adalah seorang mukmin. Dalam teori *worldview,* keimanan kepada Tuhan berimplikasi kepada seluruh kehidupan seseorang. Maka dari itu,

membawa ketentraman dalam kehidupan beragama masyarakatnya. Hal itu dibuktikan dengan minimnya konflik beragama dalam suatu kerajaan, bahkan dengan banyaknya raja-raja Hindhu dan Budha yang masuk kedalam agama Islam.[20] Adapun penolakan yang dilakukan kaum Muslimin terhadap Kristen Katholik dan Protestan yang dibawa oleh barat bukanlah didasari kebencian yang dibangun diatas kedua agama tersebut, namun atas pemikiran mereka bahwa kedua agama tersebut merupakan salah satu bentuk penjajahan barat yang dibuktikan dengan maraknya kegiatan misionaris dan politik kristenisasi.[21]

Sila Kedua, datangnya Kerajaan Islam ke Nusantara menghapuskan sistem kasta yang sudah mendarah daging di komunitas masyarakat Indonesia. Hal ini secara tidak langsung menghapus ketidakadilan sosial dan jarak yang ada dalam lingkungan masyarakat. Munculnya hal ini selaras dengan ajaran Islam yang memandang sama rata terhadap seluruh manusia, dan tidak membeda-bedakan kasta, ras, dan lain sebagainya kecuali atas takwa[22] Perasaan inilah yang membangun keadilan pemerintahan terhadap rakyatnya, kepemimpinan yang tidak hanya dilandasi dengan kepentingan duniawi, namun juga rasa tanggung jawab atas kepemimpinannya kepada Allah Swt. Selain itu dalam pemerintahan Kerajaan Islam terdapat sikap saling menghargai dan menghormati hak-hak yang melekat dalam diri pribadi tanpa kecuali. Ajaran Islam juga menghapus adanya diskriminasi dan kezaliman di dalam lingkungan Masyarakat Indonesia.[23] Karena adanya agama pada masyarakat Indonesia pada kala itu, tidak hanya berhenti pada pengaturan hubungan antar manusia namun juga pada tuhan, lingkungan dan alam semesta.[24]

Sila Ketiga, adanya Kerajaan Islam di Nusantara membentuk persatuan secara tidak langsung bagi masyarakat Indonesia, khususnya setelah kolonialisme masuk ke Nusantara. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, perjuangan kerajaan Islam untuk mengusir penjajahan memunculkan semangat persatuan dan nasionalisme. Bahkan pemerintah Hindia-Belanda terancam kekuasaannya ketika kekuatan-kekuatan lokal menunjukkan perlawanannya terhadap pemerintah kolonial.[25] Hal ini dibuktikan dengan banyaknya peperangan yang diprakarsai oleh kerajaan Islam sebagai bentuk perlawanan atas pemerintah kolonial, seperti perlawanan Mataram yang dipimpin oleh pemerintahan Sultan Agung (1613-1645), perlawanan rakyat Makassar yang dipimpin oleh Hasanuddin (1667), perlawanan di Banten oleh Sultan Ageng Tirtoyoso (1684), Perlawanan Trunonjoyo yang dipimpin oleh Untung Suropati pada akhir abad ke-17. Kemudian berbagai macam ini diikuti oleh gerakan-gerakan di berbagai belahan Nusantara hampir satu abad setelahnya, seperti gerakan Pattimura di Maluku (1817), Baharudin di Palembang (1819), Imam Bonjol di Minangkabau (1821-1837), Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah (1825-1830), Teuku Umar di Aceh (1860), Anak Agung Made di Lombok (1894-1895), Sisimangaraja di tanah Batak (1900), dan masih banyak lagi perlawanan

menjadi Mukmin dapat menjamin seseorang menjadi Pancasilais sejati. Sebab iman dalam Islam adalah induk kebaikan. Implikasi dan Implementasi serta bukti dari keimanan dalam Islam adalah berbuat baik kepada sesame manusia". Lihat, Hamid Fahmy Zarkasyi, *Rasional Tanpa Menjadi Liberal….., hal. 351*

[20] Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah: Mahakarya,…... hal. 343*

[21] *Ibid. 344*

[22] QS. Al Hujurat: 13

[23] M. Saifullah Rohman, "Kandungan Nilai-Nilai Syariat…….. *hal. 211*

[24] Hamdan Zoelva, "Relasi Islam, Negara, dan Pancasila dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia" dalam *de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, *Vol. 4, No. 2*. 2012. *hal.101*

[25] Achmad Syafii Maarif, *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara……,. hal. 53*

lainnya.[26] Meskipun masih bersifat kedaerahan, namun adanya kerajaan Islam di Indonesia mulai memotivasi Masyarakat Indonesia untuk memunculkan persatuan dalam perjuangan mengusir kolonialisme.

Yang Keempat, permusyawarahan merupakan konsep yang lahir dari ajaran *syura* dalam ajaran Islam. [27] Dari ajaran tersebut masyarakat Indonesia diarahkan untuk menghargai pendapat individu lain, komitmen melaksanakn hasil musyawarah, bersikap lemah lembut dalam bermusyawarah dan lain sebagainya. Musyawarah merupakan sistem kenegaraan yang dianut oleh Indonesia dalam menghadapi permasalahan atas asas permusyawaratan dan perwakilan.[28] Dan hal ini telah diterapkan oleh berbagai kerajaan Islam dalam pemerintahannya dengan konsep *syura* yang mereka gunakan untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Hal ini diperkuat dengan dibentuknya Lembaga-lembaga *syura* dari kalangan ulama dan pemerintah.

Sila Kelima, ajaran Islam tidak hanya membawa ajaran tauhid namun juga ajaran syariat yang mengatur kehidupan masyarakatnya. Ajaran Islam juga mengisyaratkan adanya keadilan dalam proses penyelenggaraan negara. Hal ini telah diimplementasikan dengan pemerintahan mayoritas Kerajaan Islam yang memberikan keadilan tanpa melihat perbedaan, kasta, suku, ras, agama dan lain sebagainya. Karena pada hakikatnya agama Islam yang dibawa oleh kerajaan Islam bertujuan sebagai *rahmatan lil alamin,* yang menjadi misi besar Islam untuk menata keadilan dalam segala sendi kehidupan.[29]

Sementara jika kita memperhatikan pola hubungan ajaran Islam dengan kehidupan masyarakat Nusantara kita akan melihat adanya empat pola yang berbeda dalam penanaman nilai-nilai Pancasila ketika masa Kerajaan Islam.[30] *Pertama,* pola Aceh yang menghadirkan Islam secara kultural dengan kultur Islam yang kuat, hingga didirikanlah kerajaan berbasis syariat. Adanya totalitas dalam penerapan syariat ini semakin berkembang, puncaknya ketika Sultan Iskandar Muda dan Iskandar Tsani. Pola ini juga melahirkan "aspirasi syariah" yang menyandarkan pelaksanaan hukum sesuai dengan tata nilai syariah Islam.

Kedua, pola Minangkabau yang popular dengan legtimasi berbentuk *adat besandi syara', syara' besandi kitabullah* (hukum adat harus didasarkan pada hukum agama, dan hukum agama harus didasarkan pada Al-Qur'an yang suci). *Ketiga,* pola Goa yang mencetuskan bentuk konstitusi dalam perancangan sistem pemerintahan. Adapun konstitusi yang dipakai adalah konstitusi Islam dan konstitusi adat. *Keempat*, pola Jawa yang populer dengan pola kejawen yang dimilikinya. Meskipun menimbulkan banyak pertentangan didalamnya terhadap banyaknya indikasi sinkretisme, namun masyarakat jawa pada saat itu berpegang teguh pada asas *kalipatollah ing tanah jawi* (penerapan ajaran-ajaran agama dan khalifah tuhan di tanah jawa).

Maka dapat kita lihat dengan jelas bahwa nilai-nilai kelima butir Pancasila telah ada dalam kehidupan kerajaan Islam di Nusantara sebelum Pancasila itu sendiri dirumuskan. Hal ini tentunya disebabkan karena Pancasila sendiri dibangun atas ajaran Islam, atau meminjam nilai-nilai yang ada dalam keislaman. Meskipun tidak bisa dilihat dan dinilai

[26] Kaelan, *Pendidikan Pacasila, hal. 25-26*
[27] QS. Asy-Syura: 38, QS. Ali Imran: 159
[28] Hamid Fahmy Zarkasyi, *Rasional Tanpa Menjadi Liberal……, hal. 353*
[29] M. Saifullah Rohman, "Kandungan Nilai-Nilai Syariat……. *hal. 213*
[30] Syaiful Arif, *Islam dan Pancasila……, hal. 59-60*

secara eksplisit, nilai pertama yang ada dalam butir Pancasila, akan memberikan pengaruh besar dalam pandangan seseorang untuk melihat, mengartikan, dan memaknai empat butir lainnya.[31]

PROSES ADOPSI NILAI-NILAI KERAJAAN ISLAM PADA RANCANGAN PANCASILA

Perumusan Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia dilakukan ketika sidang BPUPKI Pertama yang dilakukan secara berturut-turut selama kurang lebih empat hari (29 Mei 1945 - 1 Juni 1945). Meskipun terdapat perbedaan atas tokoh yang menggali Pancasila itu sendiri, dimana beberapa golongan mengatakan penggali Pancasila satu-satunya adalah Soekarno.[32] Namun beberapa pendapat nilai pancasila yang disampaikan oleh Muh. Yamin terhadap bentuk negara Indonesia yang disarikan dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia, yaitu permusyawaratan (Al-Qur'an)-Mufakat (adat), Perwakilan (adat), dan Kebijaksanaan (rasionalisme) menjadi dasar pemikiran lahirnya pancasila. Didalam pidatonya juga Muh. Yamin menyampaikan secara tidak sengaja lima butir nilai Pancasila, kemudian melampirkan rancangan usulan UUD RI sementara.[33] Pendapat Muh. Yamin tersebut kemudian dilengkapi oleh Prof. Dr. Soepomo yang mengemukakan beberapa pendapat mengenai prinsip dasar negara *(philosofische grondslag)*.

Sementara itu Soekarno kemudian merumuskan beberapa hal dalam sidang BPUPKI tersebut, yaitu merumuskan lima prinsip yang akan menjadi dasar negara Indonesia berupa prisip Nasionalisme (kebangsaan Indonesia), Internasionalisme (peri kemanusiaan), mufakat (demokrasi), kesejahteraan sosial, ketuhanan yang maha esa (ketuhanan yang berkebudayaan).[34] Di dalam pendapatnya tersebut, para pemikir modern menuduh bahwasanya Soekarno merupakan tokoh pemikir sekuler, karena mengakhirkan penempatan sila ketuhanan dari posisi seharusnya yang menjadi primakausa dari sila-sila lainnya.[35] Namun disisi lain Hamka Haq berpendapat bahwasayan Soekarno tidak bermaksud untuk "menyepelekan" urutan tersebut dengan menempatkan sila ketuhanan pada sila terakhir. Bung Karno memandang bahwa ketuhanan merupakan *final cause*/*ultimate cause* yang menjadikan tuhan sebagai tujuan akhir dari pengamalan dan pengabdian manusia.[36] Hal ini tentunya tidak bisa dilepaskan dari implikasi pemikiran Nasakom milik Soekarno yang merupakan gagasan sintesis dari Nasionalisme, Islamisme

---

[31] Mhd. Alfgamahjri Sukri, "Islam dan Pancasila……., *hal 93*
[32] Kaelan, *Pendidikan Pacasila, hal. 30*
[33] Isi dari rancangan UUD RI oleh Muh. Yamin dibuka dengan pembukaan berikut ini. "Untuk membentuk Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menyuburkan hidup kekeluargaan, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kedamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang dasar Negara, Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan yang Maha Esa, Kebangsaan, Persatuan Indonesia. Dan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarahan perwakilan, dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lihat: *Ibid. 31*
[34] *Ibid. hal. 32*
[35] M. Saifullah Rohman, "Kandungan Nilai-Nilai Syariat……. *hal. 210*
[36] *Ibid. 213*

dan Marxisme yang diyakininya. Meskipun muncul banyak perspektif negatif dari diri Soekano atas pemikirannya, kita tidak dapat melupakan fakta bahwasannya Soekarno juga merupakan seorang pemikir dan pejuang Islam.[37] Hal ini juga diperkuat dalam beberapa pendapat terhadap beberapa perkataan Soekarno yang menegaskan kepercayaan religiusnya.[38]

Perumusan Pancasila kemudian dilanjutkan dengan sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10-16 Juli 1945 yang melahirkan bentuk rancangan *preambul*e hukum dasar yang disepakati oleh panitia Sembilan.[39] Kemudian dalam sidang ini pula dirumuskan Undang-Undang Dasar (UUD) negara, sekaligus bentuk negara dan daerah kekuasaan Republik Indonesia. Meskipun telah disepakati oleh mayoritas dewan sidang, pencantuman kalimat *"dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya"* dalam rumusan Pancasila menimbulkan ketidaksetujuan dari beberapa pihak. Akhirnya polemik ini diselesaikan dengan keputusan pada *Jakarta Charter* (Piagam Jakarta 22 Juni 1945) yang menghapuskan kalimat tersebut dan menggantinya dengan kalimat *"Ketuhanan yang Maha Esa"* pada sila pertama Pancasila.[40] Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas negara Indonesia yang kala itu baru merdeka, meskipun pada akhirnya rumusan ini juga menimbulkan berbagai problematika setelah merdekanya Indonesia. Keputusan ini juga senada dengan pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 yang mendukung adanya prinsip yang menjaga perdamaian terhadap keragaman beragama di Indonesia.[41]

Meskipun perumusan Pancasila merupakan hasil dari berbagai macam asimilasi terhadap berbagai pemikiran para perumusnya, tetapi kita tidak bisa melepaskan faktor Kerajaan Islam yang telah membentuk berbagai hal terhadap masyarakat Indonesia bahkan para perumus Pancasila itu sendiri. Nilai-nilai keislaman seperti ketauhidan, musyawarah, keadilan, serta persatuan menjadi nilai dasar Pancasila itu sendiri. Jika kita

---

[37] Ahmad Basarah, *Bung Karno Islam dan Pancasila*. Jakarta: Konstitusi Press. 2017. *hal. 1*

[38] Ahmad Basarah mengutip penggambaran diri Soekarno dalam buku karya Sarinah, "Dalam cita-cita politikku, aku ini seorang nasionalis. Dalam cita-cita sosialku aku ini sosialis. Di dalam cita-cita sukmaku, aku ini sama sekali theis. Sama sekali percaya kepada tuhan, sama sekali ingin mengabdi kepada Tuhan". Lihat: *Ibid. hal. 3*

[39] Adapun bentuk rancangan preambule yang mencantumkan Pancasila adalah, "…. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu hukum dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Lihat: Kaelan, *Pendidikan Pacasila, hal. 36*

[40] Hamdan Zoelva, "Relasi Islam, Negara, dan Pancasila……., *hal. 100*

[41] Dalam orasinya Soekarno mengatakan, "Prinsip yang kelima hendaknya; Menyusun Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al-Masih. Yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad Saw. Orang Budha menjalankan ibadahnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya bertuhan. Hendaknya negarra Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni tiada egoisme-agama. Dan hendaknya Negara Indonesia satu negara yang bertuhan! Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam, maupun Kristen dengan cara berkeadaban. Apakah cara berkeadaban itu? Ialah hormat menghormati satu sama lain". Lihat: M. Saifullah Rohman, "Kandungan Nilai-Nilai Syariat….., *hal. 209-210*

mendalami secara komprehensif terhadap munculnya ideologi Pancasila, maka kita akan menemukan berbagai macam nilai yang diletakkan kerajaan-kerajaan Islam didalamnya.

KESIMPULAN

Setelah memperhatikan perjalanan berdirinya kerajaan Islam di Indonesia, bentuk perkembangannya hingga proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, kita dapat menyimpulkan bahwasanya terdapat berbagai macam warisan nilai yang diwariskan oleh Kerajaan Islam di Indonesia terhadap Pancasila. Baik dari perjalanan panjang perjuangan kerajaan Islam untuk mengusir penjajahan di Indonesia, hingga melahirkan peradaban yang diisi oleh nilai-nilai yang akan menjadi cikal bakal Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nilai-nilai ini dapat kita lihat dalam setiap butir sila yang dikandung oleh Pancasila itu sendiri.

Disamping itu kita juga bisa melihat adanya empat pola terhadap munculnya nilai-nilai dasar Pancasila pada masa kerajaan Islam, yaitu pola Aceh, pola Minangkabau, pola Goa, dan pola Jawa. Tentunya proses sintesisasi nilai-nilai tadi pada perumusan Pancasila bukanlah proses yang sederhana. Terdapat berbagai macam proses yang panjang dalam Pancasila sendiri yang merupakan buah pemikiran dari pada para perumusnya. Namun kita juga tidak dapat melepaskan peran penting nilai-nilai yang timbul pada masa Kerajaan Islam sehingga mempengaruhi masyarakat Indonesia dan para pemikir tersebut. Hingga pada akhirnya melahirkan sebuah ideologi dan dasar kenegaraan di Indonesia yang dikenal dengan Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Alim, Sahirul. 2019. "Islam, Multikulturalisme, dan Pancasila" dalam *Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan, Vol. 23, No. 2.*

Amarseto, Binuko. 2015. *Ensklopedia Kerajaan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Istana Media.

Arif, Syaiful. 2018. *Islam, Pancasila, dan Deradikalisasi, Meneguhkan Nilai Keindonesiaan.* Jakarta: Elex Media Komputindo.

Basarah, Ahmad. 2017. *Bung Karno Islam dan Pancasila*. Jakarta: Konstitusi Press.

Kaelan. 2016. *Pendidikan Pacasila.* Yogyakarta: Paradigma.

Maarif, Achmad Syafii. 2006. *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante.* Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Nursyarief, Aisyah. 2014. "Pendidikan Islam di Indonesia dalam Lintasan Sejarah (Perspektif Kerajaan Islam)" dalam *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Vol. 17 No. 2*. 2014.

Rohman, M. Saifullah. 2013. "Kandungan Nilai-Nilai Syariat Islam dalam Pancasila" dalam *Millah: Jurnal Studi Agama, Vol. 13, No.1.*

Sukri, Mhd. Alfahjri. 2019. "Islam dan Pancasila dalam Pemikiran Mohammad Natsir" dalam *Alfuad: Jurnal Ilmiah Sosial Keagamaan, Vol.3 No.1.*

Suryanegara, Ahmad Mansur. 2018. *Api Sejarah: Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jilid Kesatu*. Bandung: Surya Dinasti

Zarkasyi, Hamid Fahmy ed. 2021. *Rasional Tanpa Menjadi Liberal, Menjawab Tantangan Liberalisasi Pemikiran Islam. Vol 1*. Jakarta: Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations (INSISTS)

Zoelva, Hamdan. 2012. "Relasi Islam, Negara, dan Pancasila dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia" dalam *de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, *Vol. 4, No. 2*.